RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

MATA PELAJARAN	: EKONOMI
KELAS /SEMESTER	: XI (SEBELAS) /GANJIL
MATERI POKOK	: Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
PENYUSUN	: Amy Hermina Nugroho, B.Sc., S.Pd., Gr.

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SMA KRISTEN REHOBOTH AMBON

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Sekolah : SMA Kristen Rehoboth Ambon
Mata Pelajaran : Ekonomi
Kelas / Semester : XI (sebelas) / Ganjil
Materi Pokok : Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
Alokasi Waktu : 8 x 45 menit (4 pertemuan)

A. Kompetensi Inti

KI 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI 2. Menghayati dan pengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI 3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan **faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif** berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator

Kompetensi Dasar	Indikator
3.5 Menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.	**Pertemuan 1** 3.5.1. Menjelaskan pengertian kebijakan moneter 3.5.2. Menjelaskan tujuan kebijakan moneter 3.5.3. Menjelaskan instrumen kebijakan moneter **Pertemuan 3** 3.5.4. Menjelaskan pengertian kebijakan fiskal 3.5.5. Menjelaskan tujuan kebijakan fiskal 3.5.6. Menjelaskan instrumen kebijakan fiskal **Pertemuan 2 dan 4** 3.5.7. Menganalisis masing-masing instrumen kebijakan moneter dan kebijakan fiskal bagi perekonomian Indonesia
4.5 Menyajikan hasil analisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.	**Pertemuan 2 dan 4** 4.5.1. Menyajikan hasil analisis tentang instrumen kebijakan moneter dan kebijakan fiskal melalui media lisan dan tulisan

C. Tujuan Pembelajaran

Melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran *cooperative learning* dan *problem based learning*, peserta didik dapat menganalis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal serta menyajikan hasil analisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dari berbagai sumber belajar yang relevan dengan bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif.

D. Materi Pembelajaran

1. **Pengertian Kebijakan Moneter**
2. **Tujuan Kebijakan Moneter**
3. **Instrumen Kebijakan Moneter**
   a. Kebijakan Diskonto *(Discount Rate Policy)*
   b. Operasi Pasar Terbuka *(Open Market Operation)*
   c. Penentuan Cadangan Kas *(Cash Ratio)*
   d. Kebijakan Kredit Selektif
   e. Imbauan Moral
4. **Pengertian Kebijakan Fiskal**
5. **Tujuan Kebijakan Fiskal**
6. **Jenis Kebijakan Fiskal atau Kebijakan Anggaran**
   a. Kebijakan Anggaran Seimbang
   b. Kebijakan Anggaran Defisit
   c. Kebijakan Anggaran Surplus
   d. Kebijakan Anggaran Dinamis
7. **Instrumen Kebijakan Fiskal**
   a. Pajak
   b. Belanja Pemerintah *(Government Spending)*
   c. Subsidi
   d. Pinjaman Publik

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran

1. Pendekatan : Saintifik
2. Model : *Cooperative Learning* dan *Problem Based Learning*
3. Metode : Ceramah, *Group Investigation, Cooperative Integrated Reading and Composition, Student Facilitator And Explaining, Cooperative Script*

F. Langkah-Langkah Pembelajaran

Pertemuan ke-1 *(Cooperative Learning)*

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
Pendahuluan	a. Kelas dipersiapkan agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar: memberikan salam, menjaga kerapian dan kebersihan ruang kelas, berdoa, presensi, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan, dan mengingatkan prosedur kelas. **<u>Fase 1 : Menyampaikan tujuan</u>** b. Peserta didik menerima apersepsi dari guru agar termotivasi dan semangat untuk mengikuti pelajaran dengan memutar video pembelajaran tentang inflasi. Pertanyaan apersepsi: Apa yang terjadi ketika negara mengalami inflasi? Bagaimana cara mengatasi inflasi? c. Peserta didik menerima penyampaian tujuan pembelajaran dari guru.	10 menit

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
Inti	**Fase 2 : Menyajikan informasi** a. Peserta didik mengamati *slide power point* yang disampaikan guru. b. Peserta didik mendengarkan penjelasan materi pengertian kebijakan moneter dan tujuan kebijakan moneter. c. Peserta didik di berikan kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang telah di sampaikan. **Fase 3: Mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok-kelompok belajar** d. Peserta didik dikelompokkan menjadi 5 kelompok. e. Perwakilan kelompok mengambil satu undian materi tentang instrumen kebijakan moneter, antara lain: 1) Kebijakan Diskonto 2) Operasi Pasar Terbuka 3) Penentuan Cadangan Kas 4) Kebijakan Kredit Selektif 5) Imbauan Moral f. Peserta didik mempelajari dan mendiskusikan materi yang telah diambil oleh perwakilan kelompok. **Fase 4: Membimbing kelompok bekerja dan belajar** g. Selama diskusi dalam kelompok, guru membimbing dan mengarahkan peserta didik. h. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya di depan peserta didik lainnya. i. Peserta didik dalam kelompok lain diberi kesempatan untuk bertanya kepada kelompok peserta didik yang presentasi **Fase 5: Evaluasi** j. Peserta didik menerima evaluasi dari guru mengenai hasil presentasi tiap-tiap kelompok dan menerima penguatan pada hal-hal penting mengenai instrumen kebijakan moneter. **Fase 6 : Memberikan penghargaan** k. Peserta didik menerima evaluasi terhadap kelompok yang terbaik dari guru.	60 menit
Penutup	a. Peserta didik bersama – sama dengan guru membuat kesimpulan materi pembelajaran kebijakan moneter yang telah dipelajari. b. Peserta didik diberikan tugas (PR) dari buku teks dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. c. Peserta didik mengucapkan salam.	20 menit

Pertemuan ke-2 *(Problem Based Learning)*

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
Pendahuluan	a. Kelas dipersiapkan agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar: memberikan salam, menjaga kerapian dan kebersihan ruang kelas, berdoa, presensi, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan, dan mengingatkan prosedur kelas. b. Peserta didik beserta guru membahas materi pembelajaran yang diberikan pada pertemuan sebelumnya. c. Peserta didik menerima penyampaian tujuan pembelajaran dari guru.	10 menit
Inti	**Fase 1 : Mengorientasi peserta didik pada masalah** a. Peserta didik diberi artikel berita yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan moneter. b. Peserta didik mengamati dan mencari informasi melalui artikel berita yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan moneter. **Fase 2: Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran** c. Peserta didik dikelompokkan sesuai artikel yang didapatkan. d. Peserta didik mendiskusikan serta menulis evaluasi kebijakan moneter dari artikel berita tersebut. **Fase 3: Membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok** e. Selama diskusi dalam kelompok, guru membimbing dan mengarahkan peserta didik. **Fase 4: Mengembangkan dan menyajikan hasil karya** f. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya di depan peserta didik lainnya. g. Peserta didik dalam kelompok lain diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan kepada kelompok peserta didik yang presentasi. h. Peserta didik menerima evaluasi dari guru mengenai hasil presentasi tiap-tiap kelompok dan menerima penguatan pada hal-hal penting mengenai kebijakan moneter.	60 menit
Penutup	**Fase 5 : Analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah** a. Peserta didik menerima evaluasi dan apresiasi terhadap kelompok yang terbaik dari guru. b. Peserta didik bersama – sama dengan guru membuat kesimpulan materi pembelajaran kebijakan moneter yang telah dipelajari. c. Peserta didik diberikan tugas membaca di rumah mengenai kebijakan fiskal. d. Peserta didik mengucapkan salam.	20 menit

Pertemuan ke-3 *(Cooperative Learning)*

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
Pendahuluan	a. Kelas dipersiapkan agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar: memberikan salam, menjaga kerapian dan kebersihan ruang kelas, berdoa, presensi, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan, dan mengingatkan prosedur kelas. **Fase 1 : Menyampaikan tujuan** b. Peserta didik menerima apersepsi dari guru agar termotivasi dan semangat untuk mengikuti pelajaran dengan memberikan gambaran tentang kebijakan fiskal, peserta didik termotivasi untuk mempertanyakan hal-hal berkaitan dengan kebijakan fiskal. c. Peserta didik menerima penyampaian tujuan pembelajaran dari guru.	10 menit
Inti	**Fase 2 : Menyajikan informasi** a. Peserta didik mengamati *slide power point* yang disampaikan guru. b. Peserta didik mendengarkan penjelasan materi pengertian kebijakan fiskal, tujuan kebijakan fiskal, dan jenis kebijakan fiskal c. Peserta didik di berikan kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang telah di sampaikan. **Fase 3: Mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok-kelompok belajar** d. Peserta didik dikelompokkan menjadi 4 kelompok. e. Perwakilan kelompok mengambil satu undian materi tentang instrumen kebijakan fiskal, antara lain: 1) Pajak 2) Pengeluaran Pemerintah 3) Subsidi 4) Pinjaman Publik f. Peserta didik mempelajari dan mendiskusikan materi yang telah diambil oleh perwakilan kelompok. **Fase 4: Membimbing kelompok bekerja dan belajar** a. Selama diskusi dalam kelompok, guru membimbing dan mengarahkan peserta didik. b. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya di depan peserta didik lainnya. c. Peserta didik dalam kelompok lain diberi kesempatan untuk bertanya kepada kelompok peserta didik yang presentasi **Fase 5: Evaluasi** l. Peserta didik menerima evaluasi dari guru mengenai hasil presentasi tiap-tiap kelompok dan menerima penguatan pada hal-hal penting mengenai instrumen kebijakan fiskal. **Fase 6 : Memberikan penghargaan** a. Peserta didik menerima evaluasi terhadap kelompok yang terbaik dari guru.	60 menit
Penutup	a. Peserta didik bersama – sama dengan guru membuat kesimpulan materi pembelajaran kebijakan fiskal yang telah dipelajari. b. Peserta didik diberikan tugas (PR) dari buku teks dan dikumpulkan	20 menit

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
	pada pertemuan selanjutnya. c. Peserta didik mengucapkan salam.	

Pertemuan ke-4 *(Problem Based Learning)*

Kegiatan	Deskripsi	Alokasi waktu
Pendahuluan	a. Kelas dipersiapkan agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar: memberikan salam, menjaga kerapian dan kebersihan ruang kelas, berdoa, presensi, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan, dan mengingatkan prosedur kelas. b. Peserta didik beserta guru membahas pekerjaan rumah yang diberikan pada pertemuan sebelumnya. c. Peserta didik menerima penyampaian tujuan pembelajaran dari guru.	10 menit
Inti	**Fase 1 : Mengorientasi peserta didik pada masalah** a. Peserta didik diberi artikel berita yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan fiskal. b. Peserta didik mengamati dan mencari informasi melalui artikel berita yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan fiskal. **Fase 2: Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran** c. Peserta didik dikelompokkan sesuai artikel yang didapatkan. d. Peserta didik mendiskusikan artikel berita yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan fiskal. **Fase 3: Membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok** e. Selama diskusi dalam kelompok, guru membimbing dan mengarahkan peserta didik. **Fase 4: Mengembangkan dan menyajikan hasil karya** i. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya di depan peserta didik lainnya. j. Peserta didik dalam kelompok lain diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan kepada kelompok peserta didik yang presentasi. k. Peserta didik menerima evaluasi dari guru mengenai hasil presentasi tiap-tiap kelompok dan menerima penguatan pada hal-hal penting mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.	60 menit
Penutup	**Fase 5 : Analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah** a. Peserta didik menerima evaluasi dan apresiasi terhadap kelompok yang terbaik dari guru. b. Peserta didik bersama – sama dengan guru membuat kesimpulan materi pembelajaran kebijakan fiskal yang telah dipelajari. c. Peserta didik diberikan post tes dalam bentuk pilihan ganda. d. Peserta didik mengucapkan salam.	20 menit

G. Penilaian

a. Teknik Penilaian

1) Penilaian Sikap

a. Teknik Penilaian : observasi

b. Bentuk Penilaian : lembar pengamatan

c. Instrumen Penilaian : jurnal

2) Pengetahuan

a. Jenis/Teknik tes : tertulis, lisan,dan penugasan

b. Bentuk Tes : pilihan ganda

c. Instrumen Penilaian (lampiran)

3) Keterampilan

a. Teknik/Bentuk Penilaian : praktik/performance

b. Instrumen Penilaian (lampiran)

b. Remedial (lampiran)

1) Pembelajaran remedial dilakukan bagi peserta didik yang capaian KD nya belum tuntas.
2) Tahapan pembelajaran remedial dilaksanakan melalui remidial *teaching* (klasikal), atau tutor sebaya, atau tugas dan diakhiri dengan tes.
3) Tes remedial, dilakukan sebanyak 3 kali dan apabila setelah 3 kali terus remedial belum mencapai ketuntasan, maka remedial dilakukan dalam bentuk tugas

c. Pengayaan (lampiran)

Bagi Peserta didik yang sudah mencapai nilai ketuntasan diberikan pembelajaran pengayaan.

H. Alat (Bahan) / Sumber Belajar:

a. Media :

- *Handout*
- *Worksheet* atau Lembar Kerja Peserta Didik
- Lembar penilaian
- *Slide PPT*
- Artikel studi kasus

Alat/Bahan :

- Penggaris, spidol, papan tulis
- LCD proyektor, laptop, printer
- Kertas putih untuk membuat poster

b. Sumber Belajar :

Anik Widiastuti, dkk. 2014. *Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XI Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial*. Klaten: PT Cempaka Putih.

Arifin, Imamul. 2009.*Membuka Cakrawala Ekonomi SMA Kelas XI*. Jakarta: BSE Depdiknas.

Ismawanto. 2009. *Ekonomi Kelas XI*. Jakarta: BSE.

S, Alam. 2017. Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XI. Jakarta: Erlangga.

Ambon, 12 April 2021

Mengetahui
Kepala SMA Kristen Rehoboth Ambon

Guru Mata Pelajaran

_____

NIP/NRK.

Amy Hermina Nugroho, B.Sc.,S.Pd.

NIP/NRK.

Catatan Kepala Sekolah

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Lampiran

MATERI PEMBELAJARAN

1. Pengertian Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral atau otoritas moneter dalam bentuk pengendalian besaran moneter dan suku bunga untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan (kestabilan ekonomi). Dalam praktek, perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan tersebut adalah stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga (rendahnya laju inflasi), membaiknya perkembangan output riil (pertumbuhan ekonomi), serta cukup luasnya lapangan kerja yang tersedia.

2. Tujuan Kebijakan Moneter

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.

Bunyi UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia :

1) Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), “Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.”

Secara umum tujuan kebijakan moneter antara lain:

a. Mengatur sistem peredaran uang
b. Menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah
c. Memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran uang giral
d. Mencegah terjadinya inflasi

3. Instrumen Kebijakan Moneter

a. Politik diskonto adalah kebijakan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga dalam rangka memperlancar likuiditas sehari-hari.
b. Politik pasar terbuka adalah kebijakan memperjualbelikan surat berharga oleh Bank Indonesia di pasar uang.
c. Politik cadangan kas atau giro wajib adalah kebijakan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas minimum di bank-bank umum.
d. Politik pagu kredit adalah kebijakan untuk meperketat atau mempermudah dalam pemberian kredit kepada masyarakat.
e. Politik pembujukan moral adalah Bank Indonesia menghimbau kepada bank umum untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi secara makro dalam menjalankan kegiatannya sehingga tidak mengganggu kestabilan ekonomi negara.

4. Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi pengeluaran dan pendapatan dengan tujuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang tinggi tanpa inflasi.

5. Tujuan Kebijakan Fiskal

Secara umum tujuan pelaksanaan kebijakan fiskal ialah untuk menentukan arah, tujuan, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi agar sesuai dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang pada gilirannya akan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Tujuan tersebut ditempuh dengan:

a. meningkatkan laju investasi;
b. meningkatkan kesempatan kerja;
c. mendorong investasi optimal secara sosial;
d. meningkatkan stabilitas di tengah ketidakstabilan ekonomi internasional.

6. Jenis Kebijakan Fiskal atau Kebijakan Anggaran

Kita mengenal ada empat macam anggaran.

1. Anggaran berimbang adalah suatu bentuk anggaran dengan jumlah realisasi pendapatan negara sama dengan jumlah realisasi pengeluaran negara. Keadaan seperti ini dapat menstabilkan perekonomian dan anggaran. Pemerintah kita menerapkan anggaran berimbang pada masa Orde Baru.
2. Anggaran defisit adalah suatu bentuk anggaran dengan jumlah realisasi pendapatan negara lebih kecil daripada jumlah realisasi pengeluaran negara. Hal ini memang sudah direncanakan untuk defisit. Pemerintah kita menerapkan anggaran defisit ini sejak tahun 2000. Ada empat cara untuk mengukur defisit anggaran, yaitu
   a. defisit konvensional, yaitu devisit yang dihitung berdasarkan selisih antara total belanja dan total pendapatan, termasuk hibah;
   b. defisit moneter, yaitu selisih antara total belanja pemerintah (di luar pembayaran pokok/utang) dan total pendapatan (di luar penerimaan utang);
   c. defisit operasional, yaitu defisit moneter yang diukur dalam nilai riil dan bukan nilai nominal;
   d. defisit primer, yaitu selisih antara belanja (di luar pembayaran pokok dan bunga utang) dan total pendapatan.
3. Anggaran surplus adalah suatu bentuk anggaran dengan jumlah realisasi pendapatan negara lebih besar daripada jumlah realisasi pengeluaran negara. Hal ini memang sudah direncanakan untuk surplus, dengan cara tidak semua penerimaan digunakan untuk belanja sehingga terdapat tabungan pemerintah. Anggaran semacam ini cocok digunakan apabila keadaan perekonomian mengalami inflasi.
4. Anggaran dinamis adalah suatu bentuk anggaran dengan pada sisi penerimaan dari tahun ke tahun ditingkatkan dan terbuka pula kemungkinan sisi pengeluaran yang meningkat sehingga anggaran pendapatan dan belanja negara selalu kembali dalam keadaan seimbang. Sisi penerimaan dapat ditingkatkan dari tabungan pemerintah yang terus bertambah, peningkatan penerimaan pajak, atau berasal dari pinjaman pemerintah.

7. Instrumen Kebijakan Fiskal

a. Pajak

Pajak memiliki kontribusi besar dalam penerimaan suatu negara. Sebagai contoh, kontribusi pajak dalam penerimaan negara Indonesia pada tahun 2008-2015 selalu berada di atas 70%. Artinya, besar kecil pajak yang dipungut negara memengaruhi besar penerimaan yang akan diperoleh negara. Oleh karena sangat memengaruhi penerimaan negara, pajak merupakan instrument utama paling efektif untuk mencapai tujuan kebijakan fiskal.

Bagaimana pajak mampu memengaruhi kestabilan perekonomian? Saat terjadi inflasi, pemerintah akan menaikkan tarif pajak untuk mengurangi jumlah pembelian barang dan/atau jasa yang dilakukan masyarakat. Penurunan jumlah pembelian akan mengurangi tingkat konsumsi masyarakat. Jika konsumsi masyarakat berkurang, tingkat permintaan agregat akan menurun dan perekonomian kembali stabil.

b. Belanja Pemerintah (Government Spending)

Pemerintah kadang mengambil keputusan untuk menambah belanja pemerintah (government spending) dengan cara menambah pembelian barang dan/atau jasa bagi kebutuhan operasional pemerintah. Penambahan anggaran belanja tersebut digunakan untuk mendorong laju pertumbuhan output produksi yang dihasilkan perusahaan. Jika perusahaan tetap berproduksi, pengusaha tidak akan mengurangi jumlah pekerja. Dengan demikian, jumlah penganggur dapat ditekan.

c. Subsidi

Subsidi merupakan pemberian insentif dari pemerintah untuk menciptakan keterjangkauan harga barang bagi masyarakat. Tujuan utama subsidi adalah menjaga daya beli masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah.

d. Pinjaman Publik

Pinjaman publik diperoleh pemerintah dengan menerbitkan dan menjual surat berharga berupa Surat Utang Negara (SUN) dan surat obligasi kepada masyarkat. Selain mengatasi kekurangan dana untuk membiayai APBN, pinjaman publik dapat mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman dari negara lain.

Lampiran

INSTRUMEN PENILAIAN

Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, b, c, d, atau e!

1. Berikut ini adalah macam-macam kebijakan moneter adalah …..
   a. Pasar terbuka
   b. Kebijakan tertutup
   c. Kebijakan terbuka
   d. Kebijakan bilateral
   e. Kebijakan multilateral

2. Kebijakan pemerintah dengan jalan menaikkan cadangan kas pada saat inflasi dan menurunkan cadangan kas pada saat deflasi, merupakan kebijakan dari …..
   a. Kebijakan cadangan kas
   b. Kebijakan pasar terbuka
   c. Kebijakan politik diskonto
   d. Tarif
   e. Kuota

3. Menurunkan nilai mata uang asing, dengan tujuan mendorong ekspor dan menghambat impor, yaitu …..
   a. Penghasil barang dan jasa
   b. Kebijakan devaluasi
   c. Kebijakan revaluasi
   d. Kebijakan normalisasi
   e. Kebijakan desentralisasi

4. Kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi, yaitu …..
   a. Kebijakan standarlisasi
   b. Kebijakan normalisasi
   c. Kebijakan dorongan moral
   d. Kebijakan devaluasi
   e. Bukan kebijakan

5. Kebijakan pemerintah dengan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara memperketat pemberian kredit, kredit boleh diberikan asal memenuhi syarat 5C, Character, Capability, collateral, capital, dan Condition of economy, tetapi pada saat deflasi syarat dapat dipelonggar …..
   a. Kebijakan pasar
   b. Kebijakan dumping
   c. Kebijakan bebas
   d. Kebijakan kredit ketat
   e. Kebijakan salah

6. Kebijakan di bidang ekonomi yang mengatur tentang pendapatan dan pengeluaran negara disebut ....
   a. Kebijakan riill
   d. Kebijakan diskonto

b. Kebijakan moneter
c. Kebijakan fiskal
e. Kebijakan pasar terbuka

7. Dua instrumen pokok dalam kebijakan fiskal adalah ....
   a. pendapatan dan pengeluaran
   b. perpajakan dan suku bunga
   c. pendapatan dan suku bunga
   d. pengeluaran dan perpajakan
   e. perpajakan dan pendapatan

8. Pemerintah merencanakan pengeluaran negara yamg lebih besar dari pendapatan. Ini berarti pemerintah mengambil kebijakan.....
   a. Anggaran surplus
   b. Anggaran defisit
   c. Anggaran berimbang
   d. Anggaran dinamis
   e. Perdagangan luar negeri

9. Salah satu cara dari pemegang otoritas moneter dalam melaksanakan kebijakan moneter adalah….
   a. menaikkan tarif pajak
   b. menurunkan tarif pajak
   c. menjual surat-surat berharga
   d. mengatur belanja pemerintah
   e. melonggarkan pengeluaran pemerintah

10. Masalah dalam jumlah uang yang beredar bukan hanya terlalu banyak uang beredar (inflasi), tetapi juga masalah kekurangan jumlah uang yang beredar atau yang dikenal dengan deflasi. Cara untuk mengatasi deflasi dilakukan dengan….
    a. penurunan tingkat suku bunga
    b. menaikkan suku bunga bank umum
    c. menjual surat-surat berharga
    d. menaikkan cadangan kas
    e. membatasi pembelian kredit

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Betul}}{10} \times 100$$

Kunci Jawaban

1. A
2. A
3. B
4. C
5. D
6. C
7. A
8. B
9. C
10. A

Lampiran

PEDOMAN PENSKORAN

1. Aspek Kognitif

No.	Nama siswa	Aspek yang dinilai		Jumlah skor
		Ketepatan jawaban	Kerapian	

Nilai = $\frac{\text{Jumlah skor perolehan}}{2}$

KRITERIA NILAI:

A = 80 -100 : Baik sekali
B = 70 -79 : Baik
C = 60 -69 : Cukup
D = < 60 : Kurang

2. Aspek Afektif

a. Lembar Pengamatan Sikap

No.	Nama Peserta Didik	Tanggung Jawab		Peduli		Responsif		Santun	
		S T	BT	S T	BT	S T	BT	S T	BT

Keterangan:

ST : Sudah Tampak
BT : Belum Tampak

b. Rubrik Penilaian Sikap

No	Nama Siswa	Sikap								
		Aktif			Bekerjasama			Toleran		
		KB	B	SB	KB	B	SB	KB	B	SB

Keterangan:

KB : Kurang baik
B : Baik
SB : Sangat baik

c. Lembar Penilaian Diskusi

No	Nama siswa	Kerja sama	Mengkomunikasikan pendapat	Tole-ransi	Keakti-fan	Meng-hargai pendapat teman	Jumlah skor	Nilai	Ket

Keterangan skor :
Masing-masing kolom diisi dengan kriteria :
4 = Baik sekali 2 = Cukup
3 = Baik 1 = Kurang
Nilai = Skor perolehan X 100
Kurang Skor Maksimal (20)

Kriteria Nilai
A = 80-100 : Baik sekali
B = 70- 79 : Baik
C = 60- 69 : Cukup
D = 0- 59 :

d. Lembar Penilaian Presentasi

No	Nama Siswa	Komu-nikasi	Sistema-tika	Wawa-san	Kebera-nian	Antu-sias	Gestur & Penam-Pilan	Jumlah Skor	Nilai	Ket

Keterangan skor :
Masing-masing kolom diisi dengan kriteria :
4 = Baik sekali 2 = Cukup
3 = Baik 1 = Kurang
Nilai = Skor perolehan X 100
Kurang Skor Maksimal (24)

Kriteria Nilai
A = 80-100 : Baik sekali
B = 70- 79 : Baik
C = 60- 69 : Cukup
D = 0- 59 :

Lampiran

MEDIA

Pertemuan Pertama

Model Pembelajaran : *Cooperative Learning*
Media : kartu undian materi

KARTU UNDIAN MATERI

KEBIJAKAN DISKONTO
OPERASI PASAR TERBUKA
PENENTUAN CADANGAN KAS
KEBIJAKAN KREDIT SELEKTIF
IMBAUAN MORAL

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

Pertemuan Kedua
Model Pembelajaran : *Problem Based Learning*
Media : artikel studi kasus

Gonjang-ganjing Ekonomi Global, Suku Bunga Turun Lagi?

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) terus mempertahankan kebijakan suku bunga yang rendah di tengah gonjang-ganjing ekonomi global. Namun, apakah kebijakan suku bunga rendah ini akan terus berlangsung? Senior Portofolio Manager-Equity PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Samuel Kesuma menilai kebijakan moneter masih akan tetap akomodatif. "Ruang pemangkasan suku bunga terlihat dari suku bunga riil Indonesia yang masih kompetitif jika dibandingkan dengan negara kawasan Asia yang memiliki defisit neraca berjalan, seperti India dan Filipina," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (14/10/2019). "Inflasi, defisit pada neraca berjalan dan prospek pertumbuhan ekonomi akan menjadi faktor pertimbangan penting dalam pemangkasan suku bunga lebih lanjut," sambung dia. Samuel mengatakan, kebijakan moneter akomodatif dapat menjadi "bantalan" bagi ekonomi Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global saat ini. Bahkan, kata dia, kebijakan itu bisa jadi tidak hanya diterapkan di Indonesia. Bank sentral di negara lain juga diperkirakan akan memilih kebijakan moneter yang akomodatif. Sebab, Manulife Investment Management memperkirakan masih ada pemangkasan suku bunga Fed 50 basis poin dalam enam bulan ke depan. Pun ada kemungkinan peluncuran stimulus lebih lanjut. Kebijakan ini dilakukan untuk mengimbangi efek negatif resesi manufaktur global, risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi dari kebijakan moneter ketat 2018, dan guncangan yang ditimbulkan oleh perang dagang AS dan China. "Kami memperkirakan bahwa sebagian besar bank sentral global akan mempertahankan suku bunga rendah dan menghindari kenaikan suku bunga setidaknya selama dua tahun ke depan," kata dia.

Sebagai informasi, sepanjang tahun 2019, BI sudah menurunkan suku bunga sebanyak tiga kali menjadi 75 basis poin (bps). Salah satu alasannya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah risiko perlambatan ekonomi global. Karena pelambatan ekonomi dunia, sejumlah bank sentral di 12 negara juga mengambil langkah serupa. Bank-bank tersebut antara lain Bank Sentral AS The Fed, bank sentral India RBI, hingga bank sentral Filipina, BSP. “Dengan adanya pertumbuhan ekonomi global yang turun, trade war, volume dagang turun, Brexit, direspons oleh semua negara yang alami pertumbuhan melambat. Beberapa bank sentral akhirnya menurunkan suku bunga,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Onny Widjanarko di Badung, Bali, beberapa waktu lalu. Adapun The Fed telah menurunkan suku bunga sebanyak 25 bps menjadi 1,75 persen. Bank sentral India (RBI) dan bank sentral Filipina juga menurunkan suku bunga masing-masing menjadi 5,4 persen dan 4,25 persen.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Gonjang-ganjing Ekonomi Global, Suku Bunga Turun Lagi?", https://money.kompas.com/read/2019/10/14/130424726/gonjang-ganjing-ekonomi-global-suku-bunga-turun-lagi.
Penulis : Yoga Sukmana
Editor : Sakina Rakhma Diah Setiawan

Pertanyaan Diskusi:

1. **Apa permasalahan yang terjadi pada wacana tersebut?**
2. **Apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut?**

BI Terapkan Suku Bunga Operasi Pasar Terbuka

Jakarta - Bank Indonesia (BI) telah menerapkan mekanisme penentuan bunga operasi pasar terbuka sejak awal bulan ini. Suku bunga operasi pasar yang tadinya *fixed rate tender* (FRT), per 1 Februari diubah menjadi *variable rate tender* (VRT).

Dengan diterapkannya bunga operasi pasar terbuka VRT, BI menjamin langkah ini bukan merupakan perubahan kebijakan moneter.

"Sudah kami terapkan sejak 1 Februari. Ini teknis lelang karena tidak ada perubahan stance kebijakan," jelas Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter BI Dody Zulverdi dalam jumpa pers di Gedung Thamrin BI, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2017).

Penerapan suku bunga operasi pasar terbuka ini dinilai lebih mencerminkan kondisi pasar. Sehingga besaran bunga ditentukan oleh para peserta lelang yang melakukan transaksi di BI. Lelang yang dimaksud adalah penjualan semua instrumen yang ada di BI, antara lain Surat Berharga Negara (SBN) hingga Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Dengan demikian, suku bunga instrumen pasar terbuka untuk tenor di atas 7 hari, mulai dari 2 pekan, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Sedangkan untuk 7 hari ke bawah masih akan ditetapkan skema FRT.

"Kalau likuiditas bank longgar maka (bunga) bisa lebih rendah, kalau mayoritas ketat, maka rata-rata tertimbang itu akan lebih tinggi. Itu adalah refleksi likuiditas, tapi juga BI kendalikan," ujar Dody.

Secara teknis besaran bunga ditetapkan pada konsensus pelelangan. Misalnya, BI menerbitkan SBI dengan target Rp 15 triliun, dari situ kemudian bank yang memiliki kelebihan likuiditas akan ikut membeli SBI dengan tingkat bunga yang beragam. BI kemudian melakukan seleksi kepada mereka yang melakukan penawaran sebelum akhirnya memutuskan penjualan.

Jika terjadi kelebihan permintaan, maka BI akan memilih bank yang meminta tingkat bunga yang serendah mungkin. Kelebihan permintaan juga menggambarkan likuditas uang di bank masih cukup tinggi.

Sedangkan jika permintaan terhadap instrumen yang diterbitkan BI tidak terlalu memuaskan, hal tersebut menandakan likuiditas perbankan terbilang ketat yang umumnya terjadi di sejumlah kesempatan.

Besaran bunga VTR yang bergerak dinamis umumnya begerak di kisaran 5-25 *basis poin* (bps) dari suku bunga masing-masing tenor. Saat ini, suku bunga yang mengikuti skema VRT mulai dari 2 minggu berada di level 4,92%, 1 bulan 5,17%, 3 bulan 5,57%, 6 bulan 5,77%, 9 bulan 5,9%, dan 12 bulan 6%.

Besaran tersebut yang kemudian mengalami perubahan, baik mengalami kenaikan maupun penurunan yang biasanya bergerak di kisaran 5-25 bps. Saya tidak bisa pastikan, mungkin kisaran 5-25 basis poin. Intinya BI juga bisa mengetahui kondisi likuiditas," ujar Dody.

Dirinya menambahkan, penetapan VRT sudah direncanakan sejak Agustus lalu, yaitu sejak BI mengubah suku bunga acuannya dari BI Rate menjadi BI 7 Days Reverse Repo Rate. Di 6 bulan pertama penerapan BI 7 Days Reverse Repo Rate, BI masih menerapkan FRT dan pada awal bulan ini untuk instrument di atas 7 hari ditetapkan menggunakan VRT.

"Sesuai dengan rencana, 6 bulan sesudah pemberlakuan BI 7 Days Reverse Repo Rate itu sejak Januari akhir kemarin masih menggunakan FRT," tutup Dody.

Sumber: https://finance.detik.com/moneter/d-3415081/bi-terapkan-suku-bunga-operasi-pasar-terbuka

Pertanyaan Diskusi:

1. **Apa permasalahan yang terjadi pada wacana tersebut?**
2. **Apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut?**

Tahun Depan, Batas Pencadangan Kas Bank Makin Longgar

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) akan kembali melonggarkan batas pencadangan kas perbankan yang disimpan di bank sentral atau dikenal dengan sebutan Giro Wajib Minimum (GWM) pada tahun depan. Hal ini guna mendukung fleksibilitas bank dalam mengelola kas yang dimilikinya.

Sejak Juli 2017, BI efektif melakukan pelonggaran GWM dari semula bersifat tetap (fix) sebesar 6,5 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK) secara harian menjadi rata-rata (averaging).

Dengan GWM averaging, pencadangan kas bank terbagi atas 5 persen dari DPK secara harian dan sisanya 1,5 persen dari DPK secara fleksibel. Namun, bank tetap harus mempertahankan setoran pencadangannya sebesar 6,5 persen dari DPK dalam dua pekan.
Lihat juga:BI Sebut 4 Risiko Global jadi 'Kerikil' Perekonomian Nasional

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan, bank sentral akan menaikkan besaran pencadangan yang bersifat fleksibel tersebut. Namun, ia belum menyebut angka pastinya.

"Komponen yang bisa di-averaging akan diperbesar. Jadi yang 1,5 persen dari 6,5 persen ini akan diperbesar," ungkap Mirza saat konferensi pers akhir tahun di Gedung BI, Kamis (28/12).

Menurutnya, dengan kelonggaran ini, bank akan memiliki kemampuan lebih untuk mengendalikan likuiditas yang dimilikinya. "Bank yang treasury-nya sudah canggih, mungkin dia akan memanfaatkan. Tapi yang masih belajar, dia belum tentu memanfaatkan," terangnya.

Selain itu, BI melihat, aturan ini akan membuat kas yang dimiliki bank lebih bermanfaat ketimbang hanya tersimpan di BI. Lalu, ia bilang, aturan ini juga akan bermanfaat bagi kestabilan pasar uang ke depan.
Lihat juga:IFC Kucurkan Radana Finance Pinjaman Rp540 Miliar

Kendati begitu, Mirza belum buka suara mengenai kapan pelonggaran ini akan efektif diterapkan. Namun, ia bilang, BI akan lebih dulu melihat kesiapan para pelaku industri. "Kami tentu akan lihat bagaimana kesiapan dari pasar keuangan dan perbankan," pungkasnya.

Di sisi lain, ia juga belum menjelaskan terkait penentuan kebijakan ini juga akan berlaku bagi bank syariah atau tidak. Sebab, November lalu, BI mengatakan, akan memberlakukan kebijakan GWM averaging yang saat ini sudah berlaku di bank konvensional kepada bank syariah. (lav/lav)

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171229090351-78-265418/tahun-depan-batas-pencadangan-kas-bank-makin-longgar

Pertanyaan Diskusi:

1. **Apa permasalahan yang terjadi pada wacana tersebut?**
2. **Apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut?**

Rupiah Melemah, Bank Lebih Selektif Salurkan Kredit

JAKARTA - Pelemahan nilai tukar rupiah saat ini membuat industri perbankan harus waspada dan pintar mengatur strategi. Salah satunya dilakukan Bank Permata. Mereka sudah mempersiapkan antisipasi volatilitas nilai tukar dengan penyaluran kredit yang lebih selektif.

Direktur Retail Banking Bank Permata, Bianto Surodjo memperkirakan likuiditas masih akan cenderung ketat. Pihak otoritas diprediksi akan mempertimbangkan potensi *capital outflow* apabila The Fed menaikkan suku bunga pada semester kedua tahun ini.

Menurutnya, hal ini membuat ruang untuk menurunkan suku bunga masih terbatas walaupun inflasi cukup rendah. "Karena BI menjaga aliran dana untuk antisipasi ekonomi AS. Kami sangat mewaspadai dampak pelemahan nilai tukar ini terhadap kredit bermasalah," ujar Bianto dalam kunjungannya ke Gedung Sindo, Jakarta, Rabu (18/3/2015).

Dia menerangkan perseroan sudah seharusnya berjaga jika tidak mau kredit bermasalahnya semakin bertambah tahun ini. Porsi kredit korporasi atau *wholesale banking* masih menjadi mayoritas dalam penyaluran kredit, sehingga wajar dampak pelemahan industri akibat volatilitas nilai tukar cukup signifikan.

"Porsi *wholesale banking* setengah dari total kredit. Dan, ke depan masih akan menjadi andalan. Namun, kami akan lebih selektif dalam proses *underwriting*," katanya.

Dia menyebutkan, perbankan mencoba menjaga risiko volatilitas nilai tukar dengan berbagai cara. Meskipun porsi kredit dalam USD hanya 20% dari total pinjaman pihaknya tetap akan mewaspadai dampak lebih luas.

"Kredit USD harus sesuai dengan cashflow nasabah korporasi. Kami prioritaskan untuk perusahaan yang sudah melakukan hedging utangnya. Kami harus disiplin untuk antisipasi risiko," ujarnya.

Bianto menegaskan pemberian pinjaman akan lebih selektif untuk sektor yang sensitif dalam kondisi berat seperti saat ini. Sektor komoditas dan industri yang sensitif pada volatilitas nilai tukar akan diseleksi dengan ketat. Setidaknya dalam semester pertama perseroan akan melihat perkembangan perekonomian dan depresiasi nilai tukar rupiah. "BI Rate memang turun, namun tidak signifikan. Masih harus dilihat apakah *cost of fund* sudah aman untuk kami turunkan suku bunga. Karena kami juga ingin kompetitif," jelasnya.

Selain selektif, Bank Permata juga menyalurkan kredit dalam portfolio yang jelas batas eksposurnya. Selain itu, penyaluran kredit terdiversifikasi dalam beberapa sektor industri untuk selalu dipantau. "Itulah kenapa di tahun lalu walaupun gross NPL atau kredit bermasalah naik tapi berhasil dikontrol, karena diversifikasi," tandasnya.
(dmd)
Sumber: https://ekbis.sindonews.com/read/978444/178/rupiah-melemah-bank-lebih-selektif-salurkan-kredit-1426688300

Pertanyaan Diskusi:

1. **Apa permasalahan yang terjadi pada wacana tersebut?**
2. **Apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut?**

Tepat, Imbauan Melepas Dollar

JAKARTA, RABU - Direktur Bank BRI Sulaiman Arif Arianto menilai imbauan Bank Indonesia agar masyarakat menukar dollarnya dengan rupiah sangat tepat. "Di situasi seperti ini, dengan memberikan imbauan moral saya kira sudah tepat, sudah seharusnya, BI tak hanya otoritas moneter yang kaku dengan kebijakannya tapi juga memberikan pendidikan bagi masyarakat," katanya di Jakarta, Rabu (19/11). Menurut dia, sebagai sebuah negara, sudah sepantasnya bila pemerintah Indonesia mendorong masyarakat untuk lebih memiliki jiwa nasionalisme dengan memilih rupiah sebagai mata uang yang digunakan. "Sangat aneh bila masyarakat sendiri memilih dollar sebagai mata uangnya di negeri ini, apalagi dalam kondisi krisis. Sebaiknya semangat nasionalisme," katanya. Menurut dia, kondisi rupiah saat ini yang terus melemah tidak bisa lagi hanya mengandalkan intervensi dengan cadangan devisa. "Cadangan devisa akan terus menipis dan malah berbahaya bagi negara secara keseluruhan kalau tergerus terus menerus. Ini memang saatnya untuk menggelorakan bersama nasionalisme di Indonesia," katanya. Ia mengatakan, yang paling penting adalah memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa Bank Indonesia akan terus berada garda depan dalam menjaga rupiah. Sementara itu, pengamat ekonomi Tony A Prasetyantono menilai imbauan agar masyarakat untuk menukarkan dolarnya saat ini tidak efektif. "Imbauan tersebut tampaknya tidak efektif. Namun sebagai Gubernur BI, Pak Boediono memang harus melakukan imbauan (moral suasion) seperti itu," katanya. Menurut dia, BI saat ini dihadapkan pada situasi yang kurang menguntungkan. Sebab, kemampuan BI dalam melakukan intervensi terus menerus terhadap rupiah saat ini akan menggerus cadangan devisa yang telah lampu kuning.. "BI juga harus lebih berhati-hati dalam melakukan intervensi, karena cadangan devisanya menipis menjadi 50,5 miliar dollar AS, padahal Juli yang lalu masih 60 miliar dollar, jadi harus sangat berhati-hati," katanya. Menurut dia, saat ini manuver kebijakan BI tidak akan efektif dalam meredam pelemahan rupiah. Namun, diperlukan langkah pemerintah untuk menaikan jaminan menjadi blanket guarantee. "Yang sekarang kita harapkan bukan manuver moneter oleh BI, tapi blanket guarantee oleh pemerintah. Ini akan lebih efektif meredam kemerosotan kurs rupiah," katanya.

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2008/11/19/15542561/tepat.imbauan.melepas.dollar.

Pertanyaan Diskusi:

1. **Apa permasalahan yang terjadi pada wacana tersebut?**
2. **Apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut?**

Pertemuan Ketiga

Model Pembelajaran : *Cooperative Learning*
Media : handout dan kartu undian materi

HANDOUT

1. Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi pengeluaran dan pendapatan dengan tujuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang tinggi tanpa inflasi.

2. Tujuan Kebijakan Fiskal

Secara umum tujuan pelaksanaan kebijakan fiskal ialah untuk menentukan arah, tujuan, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi agar sesuai dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang pada gilirannya akan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Tujuan tersebut ditempuh dengan:

- **a.** meningkatkan laju investasi;
- **b.** meningkatkan kesempatan kerja;
- **c.** mendorong investasi optimal secara sosial;
- **d.** meningkatkan stabilitas di tengah ketidakstabilan ekonomi internasional

3. Jenis Kebijakan Fiskal atau Kebijakan Anggaran

Kita mengenal ada empat macam anggaran.

1. Anggaran berimbang adalah suatu bentuk anggaran dengan jumlah realisasi pendapatan negara sama dengan jumlah realisasi pengeluaran negara. Keadaan seperti ini dapat menstabilkan perekonomian dan anggaran. Pemerintah kita menerapkan anggaran berimbang pada masa Orde Baru.
2. Anggaran defisit adalah suatu bentuk anggaran dengan jumlah realisasi pendapatan negara lebih kecil daripada jumlah realisasi pengeluaran negara. Hal ini memang sudah direncanakan untuk defisit. Pemerintah kita menerapkan anggaran defisit ini sejak tahun 2000. Ada empat cara untuk mengukur defisit anggaran, yaitu
   a. defisit konvensional, yaitu devisit yang dihitung berdasarkan selisih antara total belanja dan total pendapatan, termasuk hibah.
   b. disit moneter, yaitu selisih antara total belanja pemerintah (di luar pembayaran pokok/utang) dan total pendapatan (di luar penerimaan utang);
   c. defisit operasional, yaitu defisit moneter yang diukur dalam nilai riil dan bukan nilai nominal;
   d. defisit primer, yaitu selisih antara belanja (di luar pembayaran pokok dan bunga utang) dan total pendapatan.
3. Anggaran surplus adalah suatu bentuk anggaran dengan jumlah realisasi pendapatan negara lebih besar daripada jumlah realisasi pengeluaran negara. Hal ini memang sudah direncanakan untuk surplus, dengan cara tidak semua penerimaan digunakan untuk belanja sehingga terdapat tabungan pemerintah. Anggaran semacam ini cocok digunakan apabila keadaan perekonomian mengalami inflasi.
4. Anggaran dinamis adalah suatu bentuk anggaran dengan pada sisi

penerimaan dari tahun ke tahun ditingkatkan dan terbuka pula kemungkinan sisi pengeluaran yang meningkat sehingga anggaran pendapatan dan belanja negara selalu kembali dalam keadaan seimbang. Sisi penerimaan dapat ditingkatkan dari tabungan pemerintah yang terus bertambah, peningkatan penerimaan pajak, atau berasal dari pinjaman pemerintah.

4. Instrumen Kebijakan Fiskal

a. Pajak

Pajak memiliki kontribusi besar dalam penerimaan suatu negara. Sebagai contoh, kontribusi pajak dalam penerimaan negara Indonesia pada tahun 2008-2015 selalu berada di atas 70%. Artinya, besar kecil pajak yang dipungut negara memengaruhi besar penerimaan yang akan diperoleh negara. Oleh karena sangat memengaruhi penerimaan negara, pajak merupakan instrument utama paling efektif untuk mencapai tujuan kebijakan fiskal.

Bagaimana pajak mampu memengaruhi kestabilan perekonomian? Saat terjadi inflasi, pemerintah akan menaikkan tarif pajak untuk mengurangi jumlah pembelian barang dan/atau jasa yang dilakukan masyarakat. Penurunan jumlah pembelian akan mengurangi tingkat konsumsi masyarakat. Jika konsumsi masyarakat berkurang, tingkat permintaan agregat akan menurun dan perekonomian kembali stabil.

b. Belanja Pemerintah (Government Spending)

Pemerintah kadang mengambil keputusan untuk menambah belanja pemerintah (government spending) dengan cara menambah pembelian barang dan/atau jasa bagi kebutuhan operasional pemerintah. Penambahan anggaran belanja tersebut digunakan untuk mendorong laju pertumbuhan output produksi yang dihasilkan perusahaan. Jika perusahaan tetap berproduksi, pengusaha tidak akan mengurangi jumlah pekerja. Dengan demikian, jumlah penganggur dapat ditekan.

c. Subsidi

Subsidi merupakan pemberian insentif dari pemerintah untuk menciptakan keterjangkauan harga barang bagi masyarakat. Tujuan utama subsidi adalah menjaga daya beli masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah.

d. Pinjaman Publik

Pinjaman publik diperoleh pemerintah dengan menerbitkan dan menjual surat berharga berupa Surat Utang Negara (SUN) dan surat obligasi kepada masyarkat. Selain mengatasi kekurangan dana untuk membiayai APBN, pinjaman publik dapat mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman dari negara lain.

KARTU UNDIAN MATERI

PAJAK
BELANJA PEMERINTAH (GOVERNMENT SPENDING)
SUBSIDI
PINJAMAN PUBLIK

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

Pertemuan Keempat

Model Pembelajaran : *Problem Based Learning*

Media : artikel studi kasus

Sri Mulyani Naikkan Subsidi Solar Jadi Rp 1.000 per Liter

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan akan menambah subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar dari saat ini Rp 500 per liter menjadi Rp 1.000 per liter. Keputusan ini akan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2018 dengan DPR.

Dia menjelaskan, keputusan penambahan subsidi Solar ini seiring dengan munculnya risiko kenaikan harga minyak dunia.

"Untuk subsidi kita pastikan akan ada kenaikan dari Rp 500 per liter menjadi Rp 1.000 per liter dengan volume 16,3 juta kiloliter (Kl)," kata Sri Mulyani di kantornya, Senin (12/3/2018).

Dengan bertambahnya subsidi ini, maka beban APBN akan bertambah sekitar Rp 4,1 triliun. Meski begitu, tambahan alokasi subsidi ini tidak memengaruhi target defisit APBN 2018 yang sebesar 2,19 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Sebenarnya kenaikan harga minyak dunia tersebut memberikan pendapatan tambahan ke pemerintah. Namun, di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan konsumsi masyarakat tetap terjaga, serta neraca keuangan PT Pertamina (Persero) juga tetap sehat.

Dengan tambahan subsidi mencapai Rp 4,1 triliun tersebut, Sri Mulyani memastikan akan meringankan Pertamina dalam menjalankan bisnisnya dan tetap melakukan ekspansi.

Tak hanya untuk BBM, Sri Mulyani juga akan menambah anggaran untuk subsidi listrik ke PT PLN (Persero). Selain sebagai dampak kenaikan harga minyak, PLN di 2018 juga akan menambah jumlah pelanggan subsidi sebesar 1 juta pelanggan. Hanya saja untuk PLN, Sri Mulyani mengaku belum memiliki detail angka penambahannya di APBN-P nanti.

"Dari semua itu, kita sangat optimistis defisit akan bisa kita kendalikan sesuai APBN 2017 di angka 2,19 persen dari PDB, jauh lebih rendah dari realisasi tahun lalu sebesar 2,49 persen," tutup Sri Mulyani.

Sumber: http://www.kemenkeu.go.id/Berita/bank-dunia-berharap-pemerintah- evaluasi-menyeluruh-pelarangan-ekspor-mineral

Pertanyaan Diskusi:

1. **Apa permasalahan yang terjadi pada wacana tersebut?**
2. **Apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut?**

Di Jepang, Sri Mulyani Ungkap Cara Tarik Pajak Google hingga Facebook

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tengah menghadiri pertemuan negara-negara anggota G20 di Fukuoka, Jepang. Dirinya pun mengungkapkan beberapa strategi menarik pajak perusahaan-perusahaan digital mulai dari Facebook hingga Google, ketika menjadi panelis dalam salah satu rangkaian acara, yaitu G20 Ministerial Symposium on International Taxation. Strategi penarikan pajak perusahaan digital ini menjadi penting, sebab menurut Sri Mulyani, besarnya potensi perpakajakan dari industri digital belum tercermin dalam realisasi penerimaan perpajakan dalam negeri.

"Dengan 260 juta populasi penduduk dan 100 jutaan pengguna internet, realisasi penerimaan perpajakan masih belum tercermin dari besaran pengguna internet dan jumlah penduduk tersebut," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini melalui akun instagramnya, @smindrawati, Sabtu (8/6/2019). Cara pertama untuk bisa memungut pajak dari perusahaan digital, menurut dia, dengan mendefinisikan ulang Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau permanent establishment yang selama ini menjadi salah satu aspek perpajakan. Dengan demikian, pemerintah tetap bisa menarik pajak dari perusahaan-perusahaan luar negeri yang beroperasi di Indonesia.

Meski demikian, perusahaan tersebut tidak memiliki bangunan fisik di dalam negeri. "Salah satu aspek perpajakan adalah tidak hanya berdasarkan kehadiran secara fisik dari para pengusaha yang melakukan kegiatan di Indonesia. Oleh karena itu, saat ini prioritas tertinggi adalah melakukan redefinisi dari BUT," ujar Sri Mulyani. Baca juga: Ini Ciri Wajib Pajak yang Jadi Sasaran Pemeriksaan Ditjen Pajak Selain itu, struktur perekonomian digital yang cenderung kompleks membuat pemerintah juga perlu melakukan formulasi perbijakan mengenai penghitungan kuantitatif mengenai tarif pajak bagi perusahaan digital. Selain itu, juga mendefinisikan ketentuan hukum terkait kebijakan pengenaan pajak rendah atau bahkan tanpa pajak sama sekali. "Tantangan lain adalah bagaimana mendefinisikan low or no tax jurisdictions dan juga bagaimana mengalokasikan hak pemajakan, terutama formula dan dasar perhitungannya," ujar dia

Adapun dalam pertemuan tersebut, beberapa tokoh penting yang turut menjadi panelis yaitu Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria, Menteri Keuangan Jepang Taro Aso, dan Menteri Keuangan China Liu Kun. Kemudian juga hadir, Menteri Keuangan Perancis Bruno Le Maire, Menteri Keuangan Inggris Phillip Hammond, dan Menteri Keuangan AS Steve Mnuchin.

Sumber: https://money.kompas.com/read/2019/06/09/090300326/di-jepang-sri-mulyani-ungkap-cara-tarik-pajak-google-hingga-facebook.

Pertanyaan Diskusi:

1. **Apa permasalahan yang terjadi pada wacana tersebut?**
2. **Apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut?**

Bank Dunia Beri Pinjaman 300 Juta Dollar AS untuk Reformasi Fiskal RI

WASHINGTON, KOMPAS.com - Dewan Direksi Eksekutif Bank Dunia menyetujui pinjaman sebesar 300 juta dollar AS pada tanggal 1 November 2017. Pinjaman ini akan membantu meningkatkan kualitas belanja pemerintah, administrasi pendapatan, dan kebijakan perpajakan. "Melanjutkan kemajuan signifikan yang telah dicapai saat ini, reformasi fiskal perlu diteruskan agar Indonesia dapat memenuhi aspirasinya," kata Rodrigo A Chaves, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dalam pernyataan resminya, Jumat (17/11/2017). Chaves menyatakan, nerancang dan menerapkan kebijakan perpajakan dan belanja yang efektif dapat secara langsung dan tidak langsung meningkatkan taraf hidup keluarga miskin dan rentan.

Dengan sistem perpajakan yang lebih efisien dan adil, akan memberikan sumberdaya lebih baik kepada pemerintah untuk menyediakan layanan penting seperti kesehatan, bantuan sosial, dan infrastruktur. Rasio pendapatan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia merupakan salah satu yang terendah di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Kesenjangan pendapatan yang ada saat ini disebabkan oleh tingkat kepatuhan yang rendah. Hal ini juga disebabkan secara sebagian rancangan kebijakan pajak yang kurang optimal sehingga terbatasnya basis pajak dan sulitnya pengelolaan. "Tanpa reformasi besar dalam pengumpulan pendapatan, seiring dengan terus berlanjutnya harga komoditas yang moderat, maka rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia mungkin akan tetap berada pada tingkat yang rendah. Ini akan sangat membatasi ruang fiskal untuk pembelanjaan prioritas pembangunan," kata Hans Anand Beck, Ekonom Utama Bank Dunia.

Pinjaman Reformasi Kebijakan Pembangunan Kedua (Second Fiscal Reform Development Policy) mendukung reformasi pemerintah untuk memperbaiki pengumpulan pendapatan dengan memperluas basis pajak dan memperbaiki tingkat kepatuhan bagi pembayar pajak individu maupun perusahaan. Pembuatan anggaran jangka menengah yang lebih banyak, proses pengadaan barang yang lebih dini, juga pemantauan belanja daerah akan mendukung efisiensi dan efektivitas belanja publik, termasuk untuk kesehatan, belanja modal infrastruktur, dan bantuan sosial. Pembiayaan ini merupakan pinjaman kedua dari tiga rangkaian pinjaman untuk mendukung reformasi fiskal Indonesia.

Pinjaman pertama mendukung reformasi yang mencakup alokasi yang lebih besar untuk program bantuan kesehatan dan bantuan sosial, juga mengurangi pengecualian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk beberapa barang konsumsi, dan telah membantu keluarga berpenghasilan rendah agar keluar dari kemiskinan.

Sumber: https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/17/194500326/bank-dunia-beri-pinjaman-300-juta-dollar-as-untuk-reformasi-fiskal-ri.

Pertanyaan Diskusi:

1. **Apa permasalahan yang terjadi pada wacana tersebut?**
2. **Apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut?**

Perbaiki SDM dan Pemerataan, Belanja Negara Rp2.528,8 Triliun di RAPBN 2020

JAKARTA - Belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Negara (RAPBN) 2020 diproyeksi mencapai Rp2.528,8 triliun atau sekitar 14,5% dari PDB. Belanja negara itu diterangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan digunakan untuk memperbaiki kualitas SDM dan melanjutkan program perlindungan sosial.

Dia juga menambahkan, belanja negara juga ditujukan untuk meningkatkan investasi dan ekspor melalui peningkatan daya saing dan produktivitas serta infrastruktur. "Ini untuk melanjutkan program perlindungan sosial serta menjawab tantangan demografi. Serta untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung transformasi ekonomi, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal," jelas Jokowi di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Lebih lanjut Jokowi mengungkapkan, belanja negara pada tahun 2020 juga difokuskan pada pengurangan ketimpangan antarwilayah. Ditambah bakal melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa, supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru.

"Selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa," paparnya

Menurutnya apabila hal ini dibiarkan berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah. Untuk itu, rencana pemindahan Ibukota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru. "Sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa," terang Jokowi.

Sumber: https://ekbis.sindonews.com/read/1430579/33/perbaiki-sdm-dan-pemerataan-belanja-negara-rp25288-triliun-di-rapbn-2020-1565947692

Pertanyaan Diskusi:

1. **Apa permasalahan yang terjadi pada wacana tersebut?**
2. **Apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut?**

SUMATIF
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Materi Pokok **: Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal**

Kelas/Semester **: XI/Ganjil**
Hari, Tanggal **:**
Waktu **: 90**
Menit

Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, b, c, d, atau e!

1. Berikut ini adalah macam-macam kebijakan moneter adalah …..
   a. Pasar terbuka
   b. Kebijakan tertutup
   c. Kebijakan terbuka
   d. Kebijakan bilateral
   e. Kebijakan multilateral

2. Kebijakan Bank Indonesia menaikkan Giro Wajib Minimum (GWM) akan berdampak pada penurunan …..
   a. Defisit APBN
   b. Tingkat bunga
   c. Kinerja perbankan
   d. Jumlah uang beredar
   e. Cadangan devisa

3. Berikut ini tabel kebijakan moneter:

No	A	B	C
1	Menurunkan cadangan kas	Terjadi sanering	Mempermudah syarat kredit
2	Menjual surat berharga	Menambah surat berharga	Suku bunga turun
3	Suku bunga naik	Kredit selektif	Menambah cadangan kas

   Kebijakan moneter yang dapat mengurangi jumlah uang beredar adalah …..
   a. A1, B2, dan C1
   b. A1, B1, dan C2
   c. A2, B2, dan C2
   d. A3, B3, dan C2
   e. A3, B3, dan C3

4. Bu Ratna bermaksud mengajukan pinjaman di bank. Oleh pihak bank, Bu Ratna disyaratkan memberikan jaminan sertifikat tanahnya. Berdasarkan pernyataan tersebut, syarat kredit yang harus dipenuhi adalah …..
   a. Condition Of Economic
   b. Character
   c. Capital
   d. *Collateral*
   e. *Capacity*

5. Untuk mengendalikan inflasi, Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan yang bersifat …..

a. Ekspansif dengan cara menjual SBI dan SBPU
b. Ekspansif dengan cara membeli SBI dan SBPU
c. Konstraktif dengan cara menetapkan pajak progresif
d. Konstraktif dengan cara menurunkan tingkat diskonto
e. Konstraktif dengan cara menaikkan giro wajib minimum

6. Ketika keadaan perekonomian sedang lesu, pemerintah menetapkan penambahan belanja pemerintah dan menurunkan tingkat pajak. Kebijakan ini disebut …..
   a. Kebijakan fiskal ekspansif
   b. Kebijakan fiskal konstraktif
   c. Kebijakan moneter ekspansif
   d. Kebijakan moneter konstraktif
   e. Kebijakan *rediscount policy*

7. Keadaan dalam masyarakat terjadi harga yang selalu naik, banyak terjadi PHK, pengangguran bertambah, inflasi semakin tinggi. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah mengadakan kebijakan antara lain:
   1) Menaikkan tarif pajak
   2) Diversifikasi pajak
   3) Menaikkan suku bunga
   4) Politik pasar terbuka
   5) Mengadakan diskriminasi harga

   Yang termasuk kebijakan fiskal adalah …..
   a. 1 dan 2
   b. 2 dan 3
   c. 3 dan 4
   d. 3 dan 5
   e. 4 dan 5

8. Kebijakan berikut ini adalah kebijakan fiskal, kecuali …..
   a. Penghapusan subsidi BBM
   b. Defisit APBN
   c. Penerapan kuota impor
   d. Penurunan tarif ekspor
   e. Penurunan tarif pajak

9. Pemerintah merencanakan pengeluaran negara yang lebih besar dari pendapatan. Ini berarti pemerintah mengambil kebijakan.....
   a. Anggaran surplus
   b. Anggaran defisit
   c. Anggaran berimbang
   d. Anggaran dinamis
   e. Perdagangan luar negeri

10. Yang bukan merupakan belanja negara adalah.....
    a. Belanja pegawai
    b. Belanja hibah
    c. Bantuan sosial
    d. Dana berimbang
    e. Pembiayaan

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas!

1. Sebutkan tujuan dari kebijakan moneter!
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan politik cadangan kas atau giro wajib minimum!
3. Jelaskan pengertian dari kebijakan fiskal!
4. Sebutkan tujuan pemerintah melaksanakan kebijakan fiskal!
5. Jelaskan instrumen kebijakan fiskal pemerintah melalui stabilisasi anggaran otomatis!

KUNCI JAWABAN ULANGAN HARIAN

Pilihan Ganda

1. A
2. D
3. E
4. D
5. E
6. A
7. A
8. C
9. B
10. D

$$\textbf{Nilai} = \frac{\textbf{Betul}}{\textbf{10}} \times 100$$

Uraian

1. Mengatur sistem peredaran uang, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran uang giral, mencegah terjadinya inflasi.
2. Politik cadangan kas atau giro wajib adalah kebijakan untuk menaikkan cadangan kas minimum di bank-bank umum pada saat inflasi atau menurunkan cadangan kas minimum di bank-bank umum pada saat deflasi.
3. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi pengeluaran dan pendapatan dengan tujuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang tinggi tanpa inflasi.
4. Tujuan pelaksanaan kebijakan fiskal ialah untuk menentukan arah, tujuan, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi agar sesuai dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang pada gilirannya akan meningkatkan kemakmuran masyarakat.
5. Dengan stabilisasi anggaran otomatis, pengeluaran pemerintah lebih ditekankan pada asas manfaat dan biaya relatif dari berbagai paket program. Pajak ditetapkan sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam keadaan kesempatan kerja penuh.

$$\textbf{Nilai} = \frac{\textbf{Betul}}{\textbf{5}} \times 100$$

Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

a. Remedial

Bagi peserta didik yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM), maka guru bisa memberikan soal tambahan misalnya sebagai berikut :

1) Jelaskan tentang perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi!
2) Jelaskan pengertian perencanaan pembangunan ekonomi!
3) Jelaskan tentang ciri-ciri perencanaan pembangunan ekonomi!
4) Jelaskan tentang unsur-unsur perencanaan pembangunan ekonomi!
5) Jelaskan tentang tujuan perencanaan pembangunan ekonomi!

CONTOH PROGRAM REMIDI

Sekolah : ……..
Kelas/Semester : ……..
Mata Pelajaran : ……..
Ulangan Harian Ke : ……..
Tanggal Ulangan Harian: ……..
Bentuk Ulangan Harian : ……..
Materi Ulangan Harian : ……..
(KD / Indikator) : ……..
KKM : ……..

No	Nama Peserta Didik	Nilai Ulangan	Indikator yang Belum Dikuasai	Bentuk Tindakan Remedial	Nilai Setelah Remedial	Keterangan
1						
2						
3						
4						
dst						

b. Pengayaan

Guru memberikan nasihat agar tetap rendah hati, karena telah mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Guru memberikan soal pengayaan sebagai berikut :

1) Mencari informasi secara online tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang telah dilakukan di Indonesia.
2) Membaca surat kabar, majalah, serta berita online tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang telah dilakukan di Indonesia.
3) Mengamati langsung tentang dampak kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang telah dilakukan di Indonesia.